



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

DR. NOVITA TRESIANA
PERTEMUAN 1
18 FEBRUARI 2022

Tugas Analisis Kebijakan

- ▶ Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik
- ▶ Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan
- ▶ Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah

Definisi AKP (1)

- ▶ Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan (DL Weimer dan AR Vinning)
- ▶ Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yg policy relevant untuk memecahkan masalah kebijakan (WN Dunn)

Definisi AKP (2)

- ▶ Cra untuk mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yg policy relevant (Walter Williams, 1971)



Tugas Analis kebijakan/policy analyst

- Membantu merumuskan cara untuk mengatasi/ memecahkan masalah
- Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan
- Mengidentifikasi issue publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah

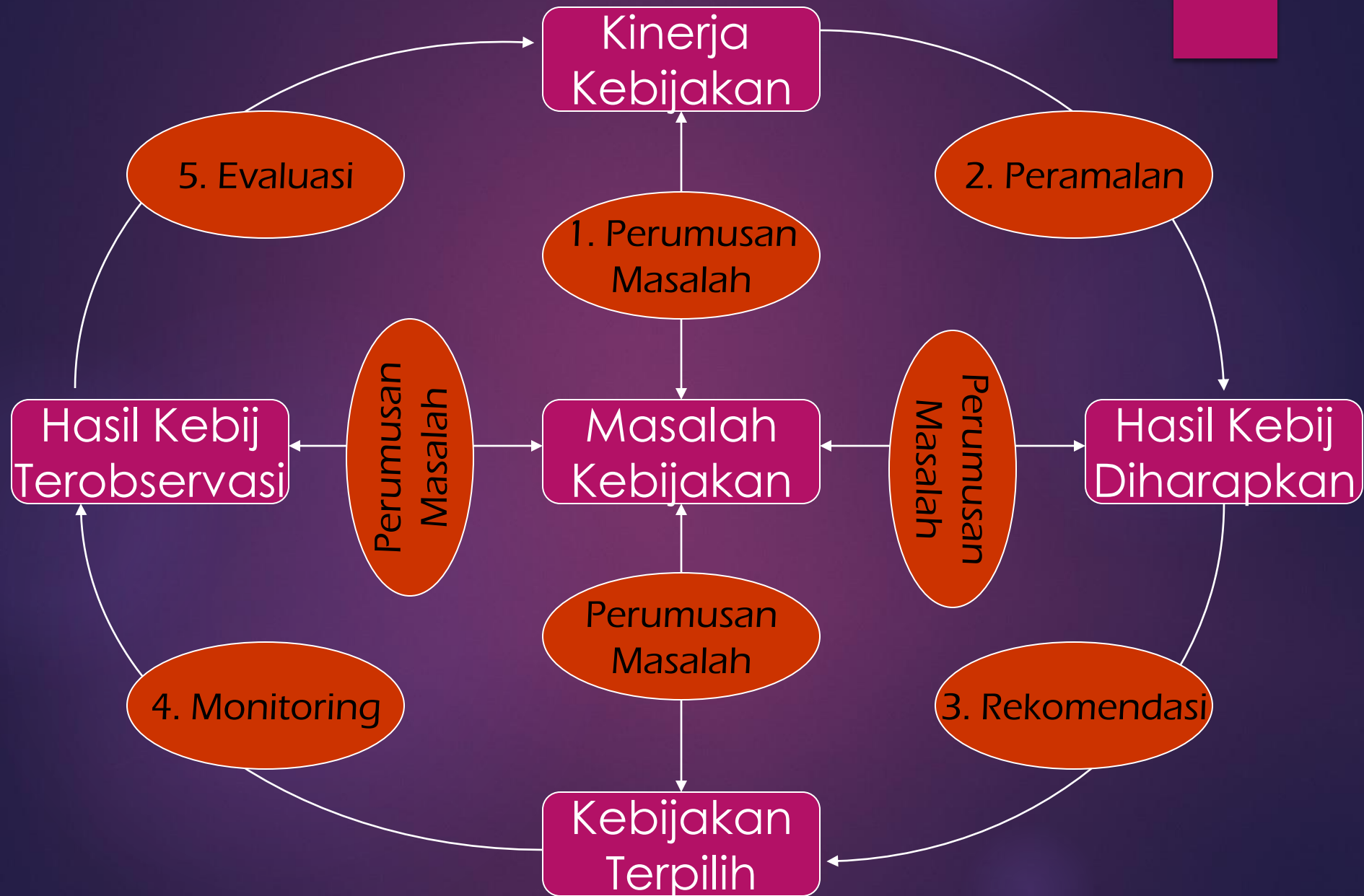


Keputusan akhir ADALAH:
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

KEPUTUSAN ADA DALAM SETIAP TAHAP PROSEDUR DAN PROSES KEBIJAKAN



Proses Analisis Kebijakan



Masalah?

- ◉ Jones (1984)

Kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan.

- ◉ Dunn(1995)

Nilai,kebutuhan,dan kesempatan yang belum terpenuhi tetapi yang dapat diidentifikasi dan dicapai dengan melakukan tindakan publik.

- ◉ Anderson(1979)

Kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya.

- × **Masalah privat**, merupakan masalah yang mempunyai akibat terbatas.
- × **Masalah publik**, merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas.
- × **Isu**, merupakan perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik.
- × **Agenda sistemik**, merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
- × **Agenda institusional**, merupakan serangkaian masalah (issues) yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

× **Walker (1982) menegaskan bahwa suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik jika:**

1. mempunyai dampak yang besar pada banyak orang.
2. Ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah serius.
3. Ada pemecahan masalah yang mudah dipahami terhadap masalah yang sedang diperhatikan tadi.

Sifat masalah publik

- ▶ Saling ketergantungan
- ▶ Subyektif (PEMIKIRAN LINGKUNGAN TERTENTU)
- ▶ Artifisial
- ▶ Dinamis (SOLUSI PEMECAHAN)

× **Jones (1984) mengemukakan masalah publik mudah menjadi kebijakan publik manakala;**

1. Skup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik (issues) tersebut dapat dikumpulkan.
2. Problem atau isu tersebut dinilai penting.
3. Ada kemungkinan masalah publik (issues) tersebut dapat dipecahkan.

× **Issue akan mudah tampil atau masuk dalam agenda sistemik menurut Cobb dan Edler dalam Jones (1984) jika:**

1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.
2. Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu.
3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya.

Proses Perjalanan Masalah- Agenda Setting

No	Tataran	Masalah
1	Private Problem	VCD porno meresahkan orangtua yang memiliki anak remaja
2	Public Problem	VCD porno meresahkan <ul style="list-style-type: none">• Orang tua yang anaknya remaja• Orang tua yang anaknya belum remaja• Pasangan suami istri yang belum memiliki anak
3	Policy Issues	<ul style="list-style-type: none">• Menghentikan produksi VCD porno• Menata sistem peredaran VCD porno• Membentengi diri dan keluarga dengan iman dan takwa
4	Systemic Agenda	<ul style="list-style-type: none">• Menata sistem peredaran VCD porno• Membentengi diri dan keluarga dengan iman dan takwa
5	Institutional Agenda	Membentengi diri dan keluarga dengan iman dan takwa

PENGERTIAN, JENIS-JENIS, DAN TINGKAT- TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

a. Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

b. James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

c. David Easton

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Kesimpulan

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
- c. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

a. **Substantive and Procedural Policies.**

Substantive Policy

Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Procedural Policy

Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders).

- Substantive and procedural policies
 - Substantive: kebijakan pendidikan
 - Procedural : pihak-pihak yg terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan (policy stakeholders)
- Distributive, redistributive, and regulatory policies
 - Distributive: kebijakan tax holiday
 - Redistributive: pembebasan tanah untuk jalan
 - Regulatory : larangan pemilikan senjata api pada masyarakat sipil

b. **Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies**

Distributive Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

Redistributive Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.

Regulatory Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.

- **Distributive:** kebijakan tax holiday
- **Redistributive:** pembebasan tanah untuk jalan
- **Regulatory :** larangan pemilikan senjata api pada masyarakat sipil

c. Material Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. Public Goods and Private Goods Policies

Public Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

- Material policy
 - Kebijakan pembuatan rumah sederhana
- Public goods and private goods policy
 - Public goods policy: kebijakan perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum, dll
 - Private goods policy: pengadaan tempat hiburan, hotel, dll

3. Tingkat-Tingkat Kebijakan Publik

Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut :

a. Lingkup Nasional

1) Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional / negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945

2) Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional.

3) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu.

b. Lingkup Wilayah Daerah

1) Kebijakan umum pada lingkup Daerah

kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah

2) Kebijakan Pelaksanaan.

- a) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA
- b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah
- c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah

Penggunaan Istilah “Kebijakan Publik” (Hogwood and Gunn, 1985)

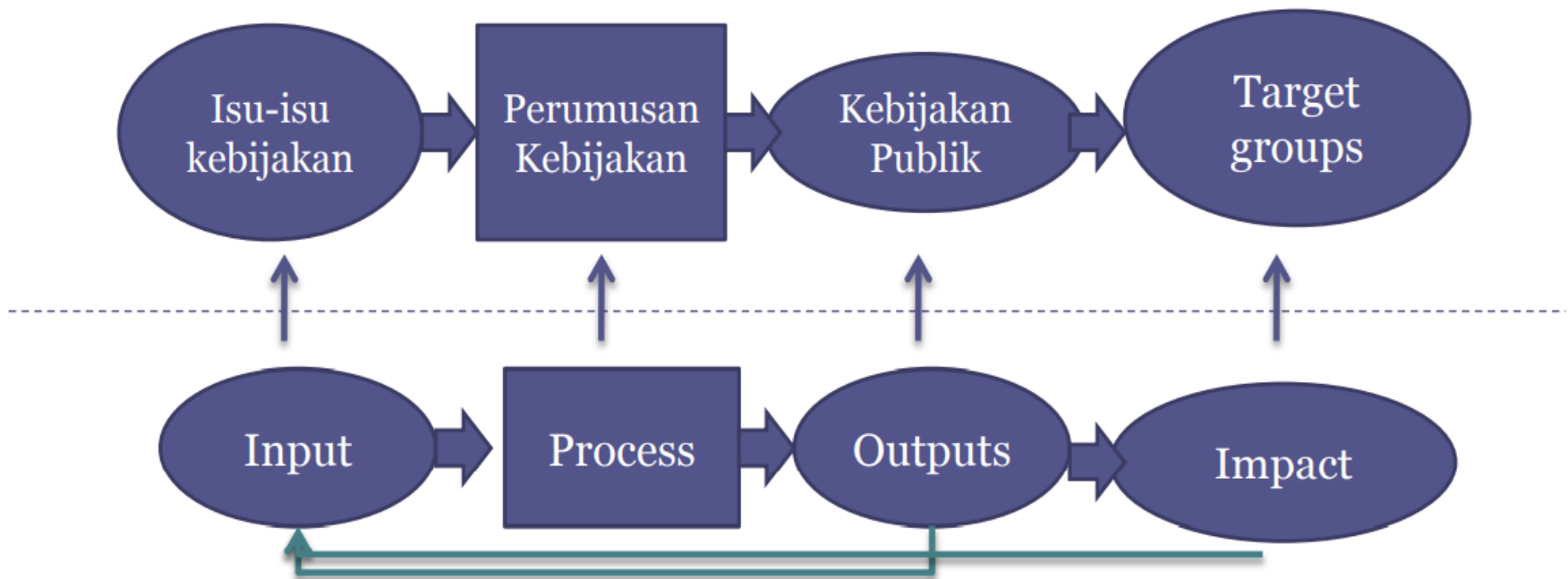
- Label untuk suatu Bidang Kegiatan tertentu
 - Kebijakan ekonomi, sosial, luar negeri
- Ekspresi tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki
 - Pernyataan visi, tujuan pembangunan
- Usulan keputusan
 - Kebijakan (Usulan) tunjangan daerah
- Pengesahan Formal
 - Perda No...

Penggunaan Istilah “Kebijakan Publik” (Hogwood and Gunn, 1985)

- Output
 - Mobil nasional
 - Pembatasan kuota premium Jawa Bali
- Outcome
 - Penertiban kawasan Bandara Soekarno Hatta
- Teori atau model
 - Kalau X dilakukan, maka dampak yang timbul adalah Y
- Proses atau tahap yang perlu dilaksanakan

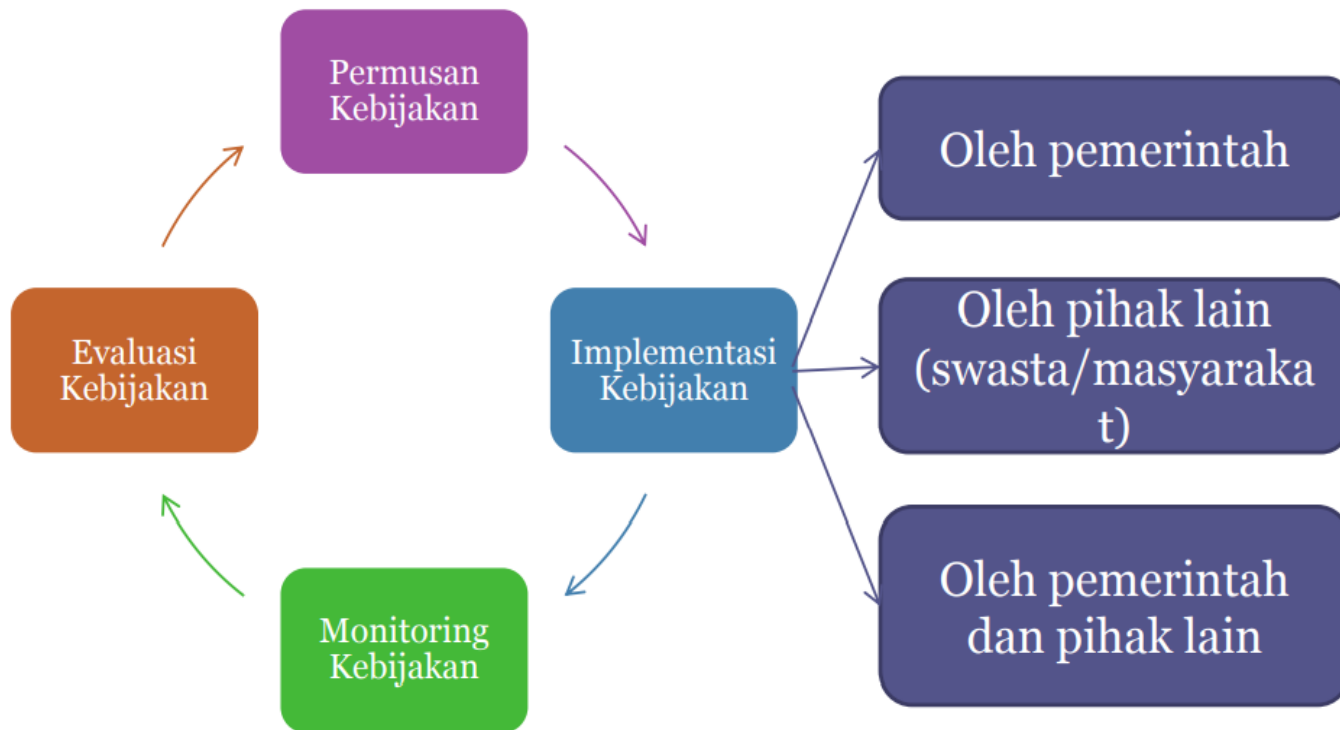
Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik

- Sistem Kebijakan Publik

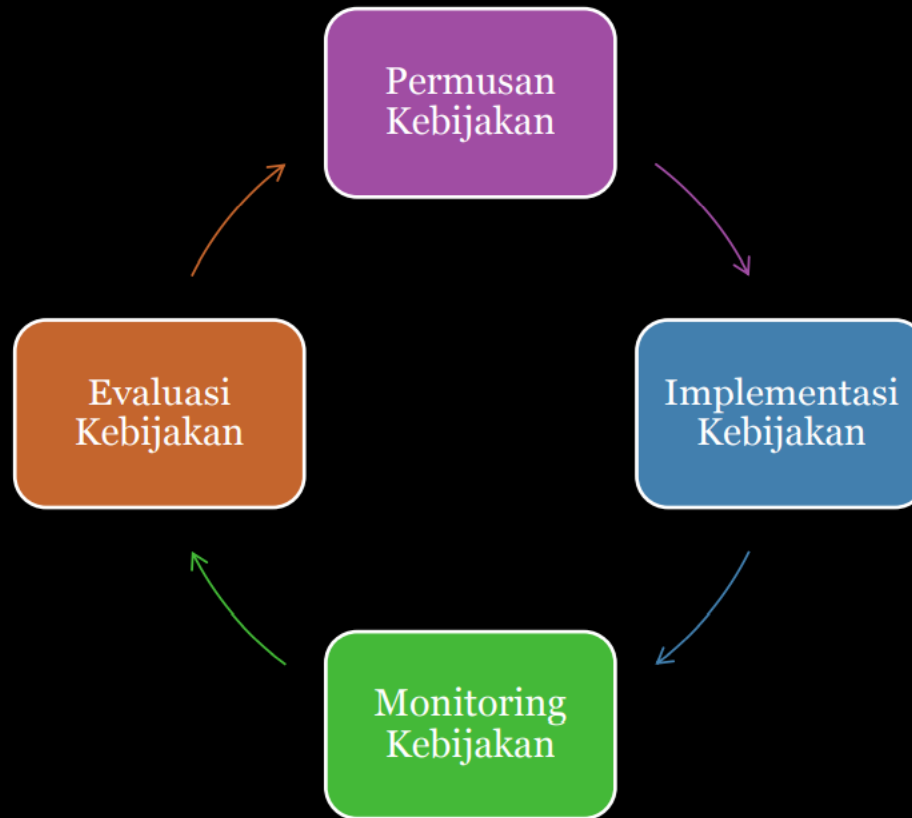


Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik

- Proses dan siklus kebijakan publik



Proses Kebijakan



SISTEM, PROSES, DAN SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

1. Sistem Kebijakan Publik

Sistem kebijakan publik, menurut Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), adalah:

keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups).

Sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur : Input -> Proses -> Output.

a. Input : Masalah Kebijakan Publik

Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya “ masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru.

b. Process (proses) : Pembuatan Kebijakan Publik

proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan.

c. Output :

Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.



d. Impact (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups)

kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaanya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

2. Proses Kebijakan Publik

a. Perumusan Kebijakan Publik

Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan)

Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya, ada tiga bentuk kebijakan publik, yaitu :

1) Kebijakan langsung

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya : INPRES SD

2) Kebijakan tidak langsung

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja.

misalnya : kebijakan pemerintah tentang Investasi Asing.

3) Kebijakan campuran

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta)

c. Monitoring Kebijakan Publik

Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).

d. Evaluasi Kebijakan Publik.

Evaluasi kebijakan publik itu bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan.

PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

PENGERTIAN DATA DAN INFORMASI

Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuatan keputusan, biasanya di catat dan di arsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembuatan keputusan.

Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan.

Syarat-syarat informasi yang baik

Parker (Kumorotomo dan Agus Margono, 1994) mengemukakan sebagai berikut :

a. Ketersediaan (availability)

Syarat pokok bagi informasi adalah tersedianya itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.

b. Mudah dipahami

Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.

c. Relevan

Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.

d. Bermanfaat

Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.

e. Tepat waktu

Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

f. Keandalan (Reliability)

Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.

g. Akurat

Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

h. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Agenda Setting

- Agenda setting adalah proses masuknya isu-isu publik kedalam agenda pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan.
- Merupakan proses yang terjadi sebelum perumusan kebijakan

Contoh Isu-isu Publik

Apes! Karena Ditipu 93 Orang Gagal Berhaji

...ihan di Kampung Cislada

Menkokesra Pastikan Stok Pangan Cukup

Jalan Bangka Raya Banir ... Cm

Demi Sekolah Pelajar Harus Berjalan Kaki Puluhan Kilometer

Tewas

Ledakan Gas Oksigen ... isergap Genangan Air

Petani dan ... dengan

Kota Besar Punya Baik Kurang dari 3 ...

cuaca ekstrem diprediksi terjadi di Indonesia hingga Februari 2011.

AGENDA SETTING

1. Isu-Isu Konseptual

Agenda setting adalah suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana isu-isu (issues) itu muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindak-lanjuti berupa tindakan-tindakan pemerintah.

Cb and Ross, seperti dikutip oleh Howeltt and Ramesh (1995), mendefinisikan agenda setting sebagai “ Proses dimana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah”

2. Proses Agenda Setting

Systemic Agenda (agenda sistemik) terdiri atas isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai pantas mendapat perhatian dari pemerintah dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing.

Tiga prasyarat agar isu kebijakan (policy issue) itu dapat masuk dalam agenda sistematis, yaitu :

- a. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
- b. Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah masalah itu.
- c. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya.

Governmental Agenda (Agenda Pemerintah) :

serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah.

Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan masyarakat dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu :

- 1) Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut adanya tindakan pemerintah, untuk mengatasi ketidak-seimbangan tersebut.

- 2) Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik, karena didorong adanya pertimbangan politik dan karena memperhatikan kepentingan umum, selalu memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan mengusulkan upaya-upaya pemecahannya.
- 3) Timbulkan krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah.
- 4) Adanya gerakan-gerakan protes, termasuk tindakan kekerasan, merupakan salah satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah.

IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan (policy outcomes).

2. Monitoring Kebijakan Publik

Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (out-comes) (Hogwood and Gunn, 1989).

William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

a. Compliance (kesesuaian/kepatuhan)

Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.

b. Auditing (pemeriksaan)

menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada mereka.

c. Accounting (Akuntansi)

Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

d. Explanation (Penjelasan)

menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

- ▶ Evaluasi kebijakan sebagai suatu pengkajian secara sistemik dan empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.
- ▶ Kesulitan dalam evaluasi kebijakan, antara lain adalah tujuan-tujuan dalam kebijakan publik jarang dilakukan (ditulis) secara cukup jelas, dalam artyi seberapa jauh tujuan-tujuan kebijakan publik itu harus dicapai. Pengembangan ukuran-ukuran yang tepat dan dapat diterima semua pihak sangat sulit dilakukan (Howlett dan Ramesh, 1995)

Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan tentang beberapa bentuk evaluasi kebijakan, yaitu :

a. Administrasi Evaluation (evaluasi Administratif)

Evaluasi administratif pada umumnya dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan penentuan, apakah penggunaan dana oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah dicapai.

b. Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial)

Evaluasi yudisial mengadakan pengkajian apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah tidak melanggar HAM dan hak-hak individu.

c. Political Evaluation (Evaluasi Politis)

Evaluasi politis masuk dalam proses kebijakan hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pemilihan umum.

Beberapa Bentuk Evaluasi Administratif, yaitu :

1) Effort Evaluation

Effort evaluation bertujuan untuk mengukur kuantitas inputs (masukan) program, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Inputs itu adalah personil, ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan lain-lain, yang dihitung berdasarkan biaya yang digunakan.

2) Performance evaluation

Performance evaluation mengkaji outputs program. Contoh, outputs rumah sakit : tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien.

3) Effectiveness Evaluation

Effectiveness evaluation bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan, kemudian diadakan perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan.

4) Process evaluation

Process evaluation mengkaji peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan dalam penyampaian program.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. Dimensi-dimensi Kebijakan Publik

Dimensi pertama, **proses kebijakan**, mengkaji proses penyusunan kebijakan, mulai dari indentifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan.

Dimensi kedua, **analisis kebijakan**, meliputi penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan.


2. Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah :

1) Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

2) Mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan.

3) Tambahan (dari William N. Dunn), keduanya dilakukan secara multidisiplin.

- 
- ▶ **Tujuan dari analisis kebijakan adalah :**
memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat.
 - ▶ Disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan

- a. Faktor Politik
- b. Faktor Ekonomi/Finansial
- c. Faktor Administratif/Organisatoris.
- d. Faktor teknologi
- e. faktor Sosial, Budaya, dan Agama.
- f. Faktor Pertahanan dan Keamanan

4. Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publik

a. Analisis mengenai perumusan kebijakan

b. Analisis mengenai implementasi kebijakan

Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab, antara lain adalah :

- 1) Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan?
- 2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut?
- 3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu?
- 4) Siapa yang secara formal diberi wewenang mengimplementasikan kebijakan dan siapa yang informal lebih berkuasa dan mengapa?
- 5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta badan-badan lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan/program.
- 6) Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan bagaimana mengkoordinasikannya?
- 7) Bagaimana tanggapan tareget group terhadap kebijakan tersebut?

c. Analisis mengenai evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan”

Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijakan membahas “hubungan di antara cara yang digubakab dan hasil yang dicapai”.

Misalnya: apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan transportasi umum?

5. Variasi Kegiatan Analisis Kebijakan

- a) Studi-studi isi kebijakan (*studies of policy content*).
- b) Studi-studi tentang proses kebijakan (*studies of policy process*)
- c) Studi-studi mengenai output-output kebijakan (*studies of policy outputs*)
- d) Studi-studi evaluasi (*evaluation studies*).
- e) Studi tentang informasi untuk pembuatan kebijakan (*information for policy making*)
- f) Proses kepenasihatatan (*advocacy process*)
- g) Nasihat kebijakan (*policy advocacy*).

SELAMAT BELAJAR